



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1443 H/2022 M
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
29-31 MARET 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

JADWAL DAN DAFTAR NAMA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERSIAPAN IBADAH HAJI
 TAHUN 1443 H/2022 M

 PERSIAPAN JAMAAH HAJI
 DARI KALIMANTAN TIMUR

BAB III KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V PENUTUP

DAFTAR NAMA

NOMOR		N A M A	JABA TAN	FRAKS I	DAPIL
UR UT	ANG T				
1.	509	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd	Ketua Tim	PDIP	SUL SEL II
2.	186	PARYONO, SH, MH	Anggota	PDIP	JATENG IV
3.	203	MY ESTI WIJAYATI	Anggota	PDIP	D.I.Y
4.	186	UMAR BASHOR, S.E	Anggota	PDIP	JATIM IV
5.	218	INA AMMANIA	Anggota	PDIP	JATIM VII
6.	298	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M.	Anggota	GOLKA R	JABAR IX
7.	304	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH	Anggota	GOLKA R	JATENG IV
8.	095	H. SUBARNA, S.E., M.Si	Anggota	GERDR A	JABAR XI
9.	351	Dra.DELMERIA	Anggota	NASDE M	SUMUT II
10.	034	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR	Anggota	PKB	JATIM II
11.	529	Dr. H. ACHMAD, M.Si.	Anggota	DEMKR AT	RIAU I
12.	559	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP	Anggota	DEM KRAT	JATIM XI
13.	434	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.	Anggota	PKS	JABAR VI
14.	-	ACHMAD SOFIAN BAHTIAR, S.SOS.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
15.	-	DICKY RACHMADI, S.A.P.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
16.	-	MOHAMMAD HASYIM, M.Si.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
17.	-	KUNTO CATUR PANGESTU, SH., MH.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
18.	-	RIZZA BIMA PERMATA	PPNPN		
19.	-	MUHAMMAD RIZKI NUGROHO	MEDIA CETAK DAN SOSIAL DPR		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Pasal 98 Ayat (4) huruf f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI.

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk melihat secara langsung kondisi obyektif persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengawasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M di Provinsi Kalimantan Timur.

D. Objek Kunjungan

Objek kunjungan kerja spesifik ini adalah pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Basuki Rahmat No. 42 Samarinda.

BAB II PERSIAPAN IBADAH HAJI TAHUN 1443 H/2022 M

1. Pemberangkatan Haji

Menteri Agama RI H. Yaqut Cholil Qoumas sesuai bertemu dengan Menteri Haji Dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah pada hari Minggu 20 Maret 2022 menginformasikan bahwa akan ada pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini dari luar Arab Saudi.

“Saya kemarin bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi, saya mendapat penjelasan bahwa akan ada pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari luar Saudi,” ujar Menag seperti dilansir website *kemenag.go.id*.¹

Menag mendiskusikan kemungkinan jumlah kuota haji Indonesia dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah. Menag berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota yang ideal seiring dengan banyaknya jemaah yang sudah menunggu dan rindu ke Tanah Suci.

“Saya sampaikan bahwa mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi, namun saya berharap Indonesia mendapat alokasi yang ideal,” kata Menag sambil menambahkan, “Saya tegaskan bahwa Indonesia siap melaksanakan haji dan memohon agar segera ada kepastian kuotanya.”

Menanggapi hal tersebut, Menteri Tawfiq F. Al-Rabiah menyatakan bahwa kuota bukan keputusan Kementerian Haji dan Umrah saja. Proses pengambilan keputusan tentang kuota melibatkan instansi terkait lainnya di Kerajaan Arab Saudi.

¹ <https://www.kemenag.go.id/read/bertemu-menteri-haji-menag-terima-kabar-ada-pemberangkatan-jemaah-luar-saudi-bge71>

2. Panja Komisi VIII DPR RI

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M, Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Kementerian Agama RI telah membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M sebagai berikut:

A. Panja Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan mengenai usulan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M dengan memasukkan biaya pemenuhan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 di dalam negeri dan di Arab Saudi, sehingga rata-rata besaran BPIH per jemaah haji reguler sebesar Rp89.292.746 (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri dari:

- 1) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp45.053.368 (*empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*) meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (*living cost*), sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, serta biaya visa.
- 2) Biaya yang bersumber dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah rata-rata per jemaah sebesar Rp44.239.378 (*empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau secara keseluruhan Rp8.994.750.278.321,83 (*delapan triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen*) meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

B. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH menargetkan penetapan dan pengesahan besaran BPIH tahun 1443 H/2022 M selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022. Untuk itu, Panja Komisi VIII DPR RI meminta Panja Kementerian Agama RI agar terus menindaklanjuti persiapan penyelenggaraan ibadah haji, terutama mengenai kepastian kuota bagi Indonesia dan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan di Arab Saudi, untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.

- C. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH telah mendapat penjelasan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI mengenai kebijakan kesehatan haji di antaranya:
- 1) Protokol Kesehatan pada keberangkatan tidak diterapkan test PCR, namun pada kepulangan diterapkan protokol kesehatan sesuai SE Kasatgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 yaitu diterapkan dua kali test PCR, satu kali di Arab Saudi dan satu kali pada saat kedatangan di Embarkasi dan diterapkan karantina 1 (satu) hari di Asrama Haji. Kebijakan tersebut bersifat dinamis dan memungkinkan terjadi perubahan. Terkait biaya PCR dan karantina akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan RI secara khusus.
 - 2) Kewajiban vaksinasi untuk jemaah haji mencakup dua jenis vaksinasi, yaitu vaksinasi meningitis dan Covid-19 dengan dosis lengkap.
 - 3) Total anggaran kesehatan haji tahun 2022 sebesar Rp327,67 miliar, dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, vaksin meningitis, operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan Penugasan Tenaga Kesehatan Haji.
 - 4) Telah disiapkan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia sebanyak 1.832 orang yang terdiri dari: 1.521 tenaga kesehatan kloter dan 311 untuk PPIH di Arab Saudi (dengan asumsi kuota penuh seperti tahun 2019).
 - 5) Melakukan integrasi aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna milik Arab Saudi.
- D. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH telah mendapat penjelasan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara (diwakili oleh Direktur Udara) dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (diwakili oleh Sesdirjen Perhubungan Darat) Kementerian Perhubungan RI, Direktur Utama PT Pertamina (diwakili oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Plh. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Direktur Utama PT Angkasa Pura I (diwakili oleh Direktur Pemasaran dan Pelayanan), dan Direktur Utama PT Airnav Indonesia (diwakili oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko), dicatat beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Direktur Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI telah menetapkan rencana 7 embarkasi untuk pelayanan penyelenggara ibadah haji.
 - 2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI menyiapkan *supporting system* pada

penyelenggaraan ibadah haji, yang pada teknisnya ditempatkan 3 (tiga) orang dari Ditjen Hubdat untuk mengawasi pelayanan transportasi darat di Arab Saudi.

- 3) PT. Garuda Indonesia sedang melakukan simulasi dengan skenario 30 persen dan 50 persen dari total kuota Jamaah Haji (Dari Kuota Total Jamaah Haji Garuda Indonesia periode Haji Tahun 2019).
- 4) PT. Saudia Airlines menyampaikan mengenai kesiapan dalam persiapan bidang penerbangan haji dengan asumsi kuota 100%, 50%, dan 30%: terdapat dua gelombang keberangkatan yaitu Gelombang I menuju Madinah dan Gelombang II menuju Jeddah serta melayani 5 embarkasi haji: Palembang, Batam, Cengkareng Jakarta, Kertajati, dan Surabaya. Selain itu telah siap melayani embarkasi-antara.
- 5) PT. Angkasa Pura I menyampaikan mengenai besaran biaya persentase *aero charge* perbandingan pada penerbangan haji tahun 2019 berada di kisaran biaya antara Rp202.269 (Solo) hingga Rp310.505 (Makassar dan Surabaya) atau rata-rata sebesar 0.68% dari total biaya haji.
- 6) PT. Angkasa Pura II menyampaikan komponen biaya *Passanger Service Charge* adalah sebesar 75.000 per jemaah dan persentase biaya airport terhadap biaya airlines adalah sebesar rata-rata 0.57% per jemaah.
- 7) PT. Airnav Indonesia menyampaikan mengenai besaran biaya navigasi penerbangan haji tahun 2019 berada di kisaran biaya rata-rata sebesar Rp31.093 / jemaah (Aceh) hingga Rp222.049 / jemaah (Makassar) atau sebesar 0.494% dari total biaya haji tahun 2019 dengan total biaya yang menjadi pendapatan Airnav Rp 38.2 M.
- 8) PT. Pertamina menyampaikan konsumsi Avtur pada masa penerbangan haji meningkat sebesar 5 % per tahun antara Tahun 2015-2019 dan estimasi range harga avtur di bandara CGK : Rp.11.178 – Rp.15.634 per liter.

3. Keputusan Pemberangkatan

Kepala Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Ridani

mengaku belum mendapat kepastian apakah jemaah haji Indonesia asal Kaltim dapat berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.

Menurut Ahmad Ridani, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar dari Kementerian Agama RI untuk kepastian keberangkatan haji bagi jemaah asal Kaltim. "Belum ada, sampai saat ini belum ada (informasi). Jadi masih menunggu," ujarnya.²

Dani memastikan bahwa Kementerian Agama RI masih terus melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk kuota bagi calon jemaah Indonesia.

Adapun untuk Kaltim sendiri, ada 2.586 jemaah yang bakal diberangkat jika memang nantinya Arab Saudi membuka kuota bagi calon jemaah Indonesia.

Calon jemaah asal Kaltim yang berangkat nanti merupakan jemaah yang semestinya berangkat ke Tanah Suci pada 2020 silam. Namun lantaran saat itu kasus Covid-19 merebak dan menjadi pandemi yang dirasakan negara-negara di seluruh belahan dunia, maka pembatasan bagi keberangkatan jemaah pun diberlakukan.

"Jadi nanti yang berangkat sesuai dengan jadwalnya, yang 2020 dulu. Jumlah itu sesuai dengan kuota yang ditetapkan pada tahun 2019," ujar Dani.

Dia pun menyebutkan sejauh ini belum ada perubahan persyaratan untuk jemaah haji yang hendak berangkat. Vaksinasi lengkap masih menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon jemaah. Selain itu, pihaknya juga masih belum bisa memastikan apakah ribuan jemaah haji asal Kaltim bisa seluruhnya berangkat.

Ke depan, Dani mengakui, selain izin dari Arab Saudi, pihaknya juga menunggu kuota teranyar yang diizinkan pemerintah setempat. Namun secara umum, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian berangkat atau tidaknya jemaah asal Indonesia.

"Bukan tidak mungkin ada pengurangan jemaah. *Nah* berapanya itu kita belum tahu. Kalau ada perubahan pasti akan dilakukan penyusunan ulang atas jemaah yang akan berangkat," ujarnya lagi.

Menurut data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dari 2.586 calon jemaah haji yang

² <https://korankaltim.com/read/headline/51154/kemenag-kaltim-masih-tunggu-arahan-pusat-mengenai-kepastian-ibadah-haji>

mengantre itu terdiri dari Kota Balikpapan 522 orang, Samarinda 567 orang, Kutai Kartanegara 525 orang, Paser 243 orang, Berau 147, Kutai Barat 85 orang, Kutai Timur 175, Bontang 143 orang, Penajam Paser Utara (PPU) 126 orang, dan Mahakam Ulu 6 orang.

Sementara jemaah lansia ada 26 orang, pembimbing haji 3 orang, dan petugas haji daerah 18 orang.

4. Daftar Tunggu Kalimantan Timur

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim Ahmad Ridani memperkirakan calon jemaah haji yang baru mendaftar di Kaltim akan berangkat 38 tahun lagi.³

Pembatalan penyelenggaraan haji selama pandemi berdampak pada daftar tunggu pemberangkatan haji yang mencapai 76 ribu orang di seluruh Kaltim.

Mereka harus bersabar, termasuk antrean di belakangnya yang juga bakal mundur. "Yang paling banyak Samarinda disusul Balikpapan dan Kukar," ujarnya.

Dari data yang dihimpun, masa tunggu paling lama ada di Kota Bontang yang mencapai 38 tahun. Daftar tunggu atau *waiting list* di Kota Bontang mencapai 5.333 orang, padahal kuotanya hanya 143 orang.

Kemudian di Samarinda, masa tunggunya 33 tahun. Lalu Balikpapan dan Kutai Timur masing-masing 32 tahun. Adapun masa tunggu paling rendah ada di Kabupaten Mahakam Ulu yang hanya 12 tahun karena kuota tiap tahun hanya 6 orang dengan *waiting list* 70 orang.

³ <https://bontangpost.id/daftar-haji-di-kaltim-sekarang-berangkatnya-38-tahun-lagi/>

BAB III

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI



Kiri ke kanan : Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Samsu Niang, M.Pd dan Kepala Bidang Penyelenggara Haji & Umrah

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di pimpin oleh Drs. H. Samsu Niang, M.Pd Anggota Komisi VIII DPR RI dapil Sulawesi Selatan II Fraksi PDI Perjuangan dengan tema Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M di Provinsi Kalimantan Timur yang diterima oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Dr. H. Ahmad Ridani, M.M beserta jajarannya, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan H. Mukhtar, S.Ag beserta jajarannya, Kasubdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri H. Nurchalis, S.T.,M.M. serta Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi Fraksi Partai Gerindra.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI memberitahukan bahwa Menteri Agama RI Bpk. H. Yaqut Cholil Qoumas sudah bertemu dengan Menteri Haji Dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 dan dari pertemuan itu diperoleh informasi bahwa akan ada pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini.

Oleh karena itulah, Komisi VIII DPR RI sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi urusan agama termasuk ibadah haji, sudah

melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka merespon rencana keberangkatan haji tersebut.

Komisi VIII DPR RI telah memberangkatkan Tim Pengawas pada hari ini ke Arab Saudi untuk mengetahui lebih detail mengenai persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, termasuk juga untuk menghitung komponen-komponen biaya *catering* dan pemondokan bagi jamaah haji Indonesia selama di Arab Saudi.

Kemudian, Panja (Panitia Kerja) Komisi VIII DPR RI saat ini sedang membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M. Panja Komisi VIII DPR RI sudah melakukan pembahasan dengan Panja Kementerian Agama RI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, PT. Garuda Indonesia, PT. Saudi Airlines, PT. Pertamina, Angkasan Pura I dan II, serta PT. Airnav untuk menghitung komponen-komponen biaya dalam BPIH Tahun 1443 H/2022 M.

Dalam konteks persiapan haji ini, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan bahwa persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kunjungan kami ke Samarinda, Kaltim, pada hari ini juga sudah barang tentu bertujuan untuk mengetahui persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kaltim dan jajarannya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji asal Kaltim pada tahun ini.

Setelah menjelaskan maksud dan tujuan ketua tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Umrah Dr. H. Ahmad Ridani, M.M menjelaskan beberapa poin persiapan penyelenggaraan sebagai berikut;

1. Melakukan identifikasi dokumen jamaah haji;
2. Melakukan proses scan paspor jamaah haji untuk dikirim ke Kementerian Agama RI;
3. Pembinaan jamaah haji melalui manasik haji melalui metode konservatif, metode online, dan metode blended learning;
4. Membentuk regu dan rombongan;

Dalam penjelasan tersebut Kabid PHU juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dengan poin sebagai berikut;

1. Vaksin;
2. Tambahan Biaya;
3. Kapan Berangkat;
4. Biaya BPIH;
5. Covid19;
6. Berapa Kuota Haji;
7. Manasik;
8. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji;
9. Daftar Tunggu Jamaah Haji Kaltim;
10. Penarikan Setoran Lunas dan Pembatalan;



Ketua Komisi IV DPRD KALTIM dalam penyampaian pada Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada Kantor Wilayah Agama Kalimantan Timur.

Diakhir penyampaian pada Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI diberikan kesempatan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja kepada Ketua Komisi IV DPRD Kaltim untuk memberikan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur khususnya jatah kuota haji.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur meyakinkan ketua tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI bahwa banyak permintaan masyarakat Kalimantan Timur khususnya sejak menjabat menjadi Ketua Komisi IV dan berharap bisa dipenuhi karena minat masyarakat terus meningkat.

Selain Kuota Haji, Ketua Komisi IV DPRD juga menyampaikan aspirasi terkait penurunan biaya haji dan peningkatan kualitas fasilitas jemaah haji, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mengaku akan mengawal aspirasi masyarakat Kalimantan Timur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam hal pengawasan mendapatkan penilaian bahwa kesiapan penyelenggaraan ibadah Haji pada kantor wilayah Kalimantan Timur Kementerian Agama Republik Indonesia berjalan dengan baik dan didukung oleh pemerintahan daerah serta dikawal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur

2. Rekomendasi

Dari Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur ini dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Meminta Kementrian Agama Republik Indonesia untuk dapat memberikan hasil quota jamaah Haji Indonesia dari hasil pertemuan perwakilan penyelenggaraan Haji di Arab Saudi;
2. Meminta Kementrian Agama Republik Indonesia untuk dapat menetapkan bersama pemangku kepentingan terkait biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi darat di Arab Saudi, dan komponen biaya lainnya agar BPIH tahun ini efisien;
3. Menyampaikan usulan kepada Kementrian Agama Republik Indonesia untuk dapat memenuhi kuota jamaah haji khususnya pada Kantor Wilayah Agama Kalimantan Timur serta penurunan biaya haji serta peningkatan kualitas fasilitas biaya haji;

BAB V PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI mengenai Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M di Provinsi Kalimantan Timur.

TIM KUNKER SPESIFIK

KOMISI VIII DPR-RI